

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia. Saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak-anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Dengan lingkungan yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Ditingkatkan masyarakat faktor-faktor seperti lingkungan yang higienis, kesehatan keluarga, pola asuh terhadap anak dan pelayanan kesehatan primer sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. Keberhasilan pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. (SDM) yang berkualitas diisikan dengan fisik yang tangguh, kesehatan yang prima, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015-2019 difokuskan pada empat program salah satunya adalah penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*) (Pusdatin Kemenkes RI, 2016).

*Stunting* merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan. Persepsi yang salah di masyarakat membuat masalah ini tidak mudah diturunkan. Hasil studi membuktikan bahwa pengaruh faktor keturunan hanya berkontribusi sebesar 15%, sementara unsur terbesar adalah terkait masalah asupan zat gizi, hormon pertumbuhan dan terjadinya penyakit infeksi berulang pada balita (Aryastami dan Tarigan, 2017). *Stunting* sendiri merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. *Stunting* juga merupakan kondisi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. *Stunting* menurut WHO *Child Growth Standart* didasarkan pada *indeks* panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (*z-score*) kurang dari -2SD. *Stunting* pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan

mental anak. *Stunting* berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental. Balita yang mengalami *stunting* memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, *stunting* juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/*inequality*, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi. Anak pendek yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena *stunting* juga dialami oleh rumah tangga/keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan RI, 2017).

Pencegahan dan penanganan *stunting* membutuhkan upaya yang bersifat *holistic* dan saling terintegrasi. Mengacu pada peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dan diperbaharui pada tahun 2021 kemaren menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merupakan salah satu strategi dalam pemerintah dalam percepatan penanganan *stunting* yang meliputi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab *stunting* secara langsung sedangkan intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab *stunting* secara tidak langsung. *Scaling Up Nutrition* (SUN) dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada *stakeholder* dan pemangku kepentingan lain diberbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya, intervensi penting penguatan 1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya di kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami, 2017).

SK Bupati HSU nomor 188.45/11/kum/2019 tentang koordinasi percepatan penanganan *stunting* di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kebijakan terbaru yang dibuat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk

menangani permasalahan stunting ini, dari SK tersebut dijabarkan bahwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, Kabupaten HSU memiliki angka stunting balita di atas rata-rata Nasional, sehingga ditetapkan sebagai kabupaten yang menjadi prioritas penanganan *stunting* secara nasional.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kalsel, Didy Ariadi mengatakan bahwa:

“Kalimantan Selatan memiliki 4 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus (lokasi khusus) penurunan *stunting* yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, Tapin dan Tabalong. Hal ini sudah terealisasi dengan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil di Kabupaten/Kota Lokus, “ini sebagai wujud keseriusan Pemprov Kalsel dalam menekan angka *stunting* dengan memperluas daerah cakupan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu penanganan *stunting* sendiri tidak bisa diselesaikan hanya dengan tenaga kesehatan saja, namun diperlukan keterlibatan sektor diluar tenaga kesehatan. “dalam penanganannya ada dua Intervensi Spesifik (jangka pendek) dan Sensitif (jangka panjang),”katanya.

Menurut Didy, intervensi Spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Kontribusinya sebesar 30% dalam penurunan kasus *stunting*. “maka dilakukan perbaikan dan pencegahan gizi buruk,” jelasnya. Sedangkan Intervensi Sensitif melibatkan sektor lain dalam kegiatan pembangunan. Misalnya program sanitasi oleh Dinas PUPR, Dinas PMD melalui dana desa, hingga sinegritas kader-kader PKK dan Posyandu. “kami harap dengan konvergensi ini, percepatan stunting bisa dilakukan,” bebernya. (iNewsKalsel.id, 25/12/2020).

Kepala BKKBN Kalimantan Selatan, Ir H.Ramlan MA, mengatakan bahwa:

“Pemerintah Provinsi Kalsel menjadikan penanganan *stunting* dan gizi buruk sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang kependudukan. Ada 3 poin utama yang dilaporkan yakni rencana Rakerda Bangga Kencana 2021, pendataan keluarga sertaperkembangan penanganan *stunting*”. (MediaIndonesia.com,26/02/2021).

Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menjadi daerah *stunting* yang cukup tinggi, dalam sebuah artikel yang dirilis pada [https://kalsel.inews.id/berita/ini-4-daerah-di-kalsel-dengan-kasus-stunting tanggal 11 Oktober 2020](https://kalsel.inews.id/berita/ini-4-daerah-di-kalsel-dengan-kasus-stunting-tanggal-11-Oktober-2020).. Pada tahun anggaran 2018 secara beberapa desa di

Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk kegiatan program *Stunting*. Yang mana hal ini juga merupakan amanah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Visi Misi Bupati Hulu Sungai Utara yaitu terwujudnya Kabupaten yang SEJAHTERA mengandung pemahaman tentang kondisi kehidupan masyarakat yang semakin baik ditinjau dari aspek pendapatan yang diperoleh, akses terhadap tingkat pendidikan yang ditempuh serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai Perda HSU No. 3 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita (KIBLA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan laporan, ada 13 Puskesmas yang masih banyak terdapat anak-anak di kategorikan *stunting*, salah satunya yaitu Puskesmas Amuntai Selatan yang mana jumlah binaan balita *stunting* di masing-masing desa yang menurut data per Desember 2020 mencapai 655 anak se Kecamatan Amuntai Selatan.

**Tabel 1.1**

Rekapitulasi *Stunting* Di Wilayah Kerja Puskesmas Amuntai Selatan Tahun 2022

No.	Desa / Kelurahan	Prevalensi Stunting
1.	Telaga Sari	13,21
2.	Murung Panggang	20,83
3.	Murung Sari	8,57
4.	Simpang Tiga	18,37
5.	Cempaka	5,77
6.	Banyu Hirang	0,00
7.	Rukam Hilir	2,94
8.	Bajawit	20,27

9.	Panyiuran	4,82
10.	Kutai Kecil	20,59
11.	Kayakah	26,83
12.	Padang Darat	8,16
13.	Mamar	7,58
14.	Keramat	10,77
15.	Telaga Silaba	3,33
16.	Teluk Paring	6,67
17.	Teluk Sari	0,00
18.	Simpang Empat	17,7
19.	Telaga Hanyar	17,81
20.	Kota Raja	3,70
21.	Jarang Kuantan	5,80
22.	Harusan Telaga	22,22
23.	Padang Tanggul	35,29
24.	Cangkering	8,33
25.	Rukam Hulu	0.00

26.	Ujung Murung	5,49
27.	Pulau Tambak	3,92
28.	Teluk Baru	14,77
29.	Jumba	8,72
30.	Ilir Mesjid	7,59
	<b>Jumlah</b>	<b>10,98</b>

*Sumber Puskesmas Amuntai Selatan 2022*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa jumlah anak *stunting* masih tinggi di desa Kayakah dan belum mencapai target dari ketetapan WHO sebesar 18,4% maka dari itu peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di Desa Kayakah. Dari data yang peneliti peroleh dari hasil rekapitulasi pemantauan status gizi (PSG) balita Puskesmas Amuntai Selatan dari tahun 2018-2022 jumlah balita *stunting* di desa Kayakah di tahun 2018 ada 11 balita *stunting*, di tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah balita *stunting* menjadi 26 balita, di tahun 2020 terdapat 68 balita, di tahun 2021 28 balita dan di tahun 2022 ada 33 balita. Angka kasus *stunting* di Desa Kayakah masih belum mencapai target dari ketetapan WHO pada 2022 yaitu 18,4% sedangkan angka *stunting* di desa Kayakah masih tinggi yaitu 26,83. Berdasarkan hasil wawancara survei awal, faktor tidak langsung dari *stunting* adalah pengetahuan masyarakat yang beranggapan bahwa *stunting* bukan masalah krusial yang harus ditangani melainkan *stunting* terjadi karena faktor keturunan atau genetik, pengetahuan ibu tentang gizi yang kurang memadai, dan terkadang sering melewatkan imunisasi yang berulang. Selain itu faktor lainnya yaitu masih banyak intervensi dari program *stunting* yang tidak berjalan dengan maksimal, dan kerjasama dari OPD terkait juga masih minim.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa desa yang paling banyak jumlah balita *stunting* di kecamatan Amuntai Selatan adalah desa Kayakah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini.

## 2. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Percepatan Penanganan *Stunting* Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa Saja Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Percepatan Penanganan *Stunting* Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

## 3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Program Percepatan Penanganan *Stunting* Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Percepatan Penanganan *Stunting* Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dijadikan sebagai tambahan masukan sehingga dapat menerapkan perpaduan antara praktik dan teoritis yang didapat di bangku kuliah, khususnya masukan di bidang ilmu kebijakan publik terkait dengan transparansi publik.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Sebagai masukan dan umpan balik guna perbaikan dunia pendidikan serta menambah referensi tentang Program Percepatan Penanganan *stunting*.
2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dan Puskesmas Amuntai Selatan dapat dijadikan masukan agar kedepannya lebih baik dalam kegiatan Program Percepatan Penanganan *stunting*.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister pada jurusan Administrasi Publik di Universitas 17 Agustus 1945.